



RENCANA KERJA (RENJA)

2022

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

KABUPATEN SAMPANG

2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka Pembangunan Daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks Pembangunan Manusia. Dalam perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan Wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan Pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam Menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Penyusunan Renja mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja DPMPTSP dan Naker tahun 2022 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan dan akan menjadi bagian dari Renstra DPMPTSP dan NAKER tahun 2022 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP NAKER Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.
39. Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perencanaan urusan Pemerintah Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Kabupaten Sampang tahun 2022 tertuang pada RKPD tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan urusan pemerintah.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung system pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk

menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ini adalah :

1. Tersedianya instrument yang dapat digunakan oleh pimpinan Organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan Organisasi;
2. Tersedianya instrument awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak – pihak dalam rangka menilai kinerja Organisasi;
3. Tersedianya instrument yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.
4. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran – sasaran strategis dalam visi dan misi kabupaten Sampang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Kerja (Renca) berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan hasil evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun lalu serta hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Hal ini dimaksud bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan untuk memastikan bahawa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun 2019 s/d 2020 di tentukan dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Sampang Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2019 s/d 2020 dapat dilihat dari tabel T – C .29.

Tabel T – C. 29
Pencapaian Renstra DPMPTSP NAKER s/d tahun 2021 (tahun berjalan)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi capaiana Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
	TUJUAN :										
	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,35	2,81	2,33	3,35	143,77	3,22	9,38	3,92
	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Kenaikan realisasi Investasi	%	0,32	9,70	9,96	-26,69	0	0,08	-16,91	-52,84
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyaeakat	Nilai	83,51	81,30	81,55	81,43	99,85	81,95	244,68	2,93
	SASARAN :										
	Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	95,52	95,73	94,98	56,91	59,92	95,13	247,77	2,59
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai realisasi Investasi	Juta Rp.	310.223.389.000	422.583.748.152	464.667.875	297.115.146 .207	63,94	299.943,8 7	1.019.642.764 .359	3,29
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,75	93,01	93,15	93,16	100,01	93,25	279,42	2,98
2.12	URUSAN PENANAMAN MODAL										
2.12.2.12.01.0 1.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	99,40	100	96,79	96,79	0	196,19	196,19

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.12.2.12.01.01.01.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat yang terkirim	surat	13950	2200	1500	1500	100	-	3000	0,22
		Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	rekening	4	4	4	4	100	-	4	1
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	11	11	11	11	100	-	11	1
		Jumlah tenaga kebersihan	OB	4	4	4	4	100	-	4	1
		Jumlah Bahan Bacaan Yang Disediakan	Exp	144	24	36	27	75	-	51	0,35
		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	Orang	84	55	30	30	100	-	85	1,011
		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi teknis	Ob	1	1	1	1	100	-	1	1
2.12.2.12.01.01.02.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	jenis	286	45	46	46	100	-	91	0,32
		Jumlah barang cetakan	Jenis	56	10	10	10	100	-	20	0,36
		Jumlah barang penggandaan	Jenis	64	12	10	10	100	-	22	0,34
		Jumlah Komponen instalasi listrik	jenis	123	19	20	18	90	-	37	0,30
		Jumlah Alat Kebersihan Yang Disediakan	Jenis	192	25	26	26	100	-	51	0,27

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.12.2.12.01.01 .03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah	liter kali	9340 590	1206 40	500 13	500 13	100 100	- -	1706 53	0,18 0,089
		Jumlah Koordinasi Luar Daerah	kali	300	79	20	18	90	-	97	0,32
2.12.01.2.12.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	-	200	2
2.12.01.2.12.01 .02.01	Pembangunan/ Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	1	1	0	0	0	-	1	1
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	2	1	1	1	100	-	2	1
2.12.01.2.12.01 .02.02	Pengadaan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	Jumlah Kendaraan dinas R4 yang diadakan	Unit	2	0	0	0	0	-	0	0
		Jumlah Kendaraan dinas R2 yang diadakan	Unit	12	0	0	0	0	-	0	0
		Jumlah Kendaraan dinas R4 yang dipelihara	Unit	6	4	4	4	100	-	8	1,33
2.12.01.2.12.01 .02.03	Pengadaan/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan Kantor	Unit	86	16	4	4	100	-	20	0,23
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	unit	10	6	0	0	0	-	6	0,6
		Jumlah pengadaan peralatan Kantor	Unit	47	9	6	6	100	-	15	0,32
		Jumlah Spanduk/ Umbul-umbul/ Bendera Yang Disediakan	Unit	8	8	32	32	100	-	40	5

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
2.12.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	100	100	100	100	100	-	100	2
2.12.2.12.01.05.01.	Pelaksanaan Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar	Ok	72	10	1	1	100	-	11	0,15
2.12.2.12.01.06	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	%	100	100	100	83,33	83,33	-	83,33	0,83
2.10.01.2.12.01.04.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/ Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	Dok	6	5	6	6	100	-	11	1,83
2.10.01.2.12.01.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	Dok	4	5	4	4	100	-	9	2,25
2.10.01.2.12.01.04.03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen SKM	Dok	1	1	1	1	100	-	2	2
		Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah		1	1	1	0	50	-	1	1
2.12.2.12.01.15	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	Investor	912	840	852	2523	296,13	2743	6106	6,70

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.12.2.12.01.15.02	Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Rapat-rapat Perencanaan Penanaman Modal Daerah dan RKPPMD	Kali	24	4	4	4	100	-	8	0,33
2.12.2.12.01.15.03	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Profil/ Prospektus Investasi dan Regulasi Kebijakan Penanaman Modal	propektus	6	1	1	1	100	-	5	0,83
			peraturan PM	6	1	0	0	0	-	1	0,17
			FGD	2	1	0	0	0	-	1	0,5
			peta peluang investasi	1	1	0	0	0	-	1	1
2.12.2.12.01.15.04	Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Investor dan Jumlah Pameran yang akan diikuti	Matcmakin g / Gathering , pameran	8	1	0	0	0	-	1	0,13
				8	2	0	0	0	-	2	0,25
2.12.2.12.01.16.	Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai investasi PMDN	(juta rupiah)	967.865,730	542.274,000	574.434,712	629.178.507,48	109,53	149.039.109.008	1.310.491.616,488	0,014
2.12.2.12.01.16.01	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pemantauan/ Pengawasan	pelaku usaha	440	40	0	0	0	-	40	0,09
		Jumlah fasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal	pelaku usaha	200	40	30	30	100	-	70	0,35
		Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	kali	14	-	-	-	0	-	0	0

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.12.2.12.01.16 .02	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah sosialisasi dan Fasilitasi Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha	200	-	0	0	0	-	0	0
2.12.2.12.01.16 .03	Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pengembangan Aplikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal	paket aplikasi	11	2	1	1	100	-	3	0,27
		Jumlah pengolahan data penanaman modal	laporan	48	0	0	0	0	-	0	0
2.12.2.12.01.17 .	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	%	100	44	100	100	100	-	144	1,44
2.12.2.12.01.17 .01	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor I	Jumlah Pemohon Izin yang telah diterbitkan di sektor I	izin	50	44	40	40	100	-	84	1,68
2.12.2.12.01.17 .02	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor II	Jumlah Pemohon Izin yang telah diterbitkan di sektor II	izin	70	21	23	23	100	-	44	0,63
2.12.2.12.01.17 .03	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor III	Jumlah Pemohon Izin yang telah diterbitkan di sektor III	izin	50	32	33	33	100	-	65	1,30
2.12.2.12.01.18 .	Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	100	50	100	80	80	-	130	1,30
2.12.2.12.01.18 .01	Fasilitasi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan	pengaduan	100	9	5	4	80	-	13	0,13
2.12.2.12.01.18 .02	Fasilitasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Peningkatan SDM	orang	344	70	0	0	0	-	70	2,06

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi capaiana Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah regulasi Perbub baru dan sosialisasi tentang pelayanan perizinan dan non perizinan		2	0	2	2	100	-	2	1
2.12.2.12.01.18 .03	Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Jumlah Laporan	pelaporan	12	12	0	0	0	-	12	1
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK	%	-	-	-	-	-	68,75	68,75	-
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK	%	-	-	-	-	-	68,75	68,75	-
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pengangguran dan Pencari Kerja yang dilatih	Orang	-	-	-	-	-	114	114	-
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan dan Sarana untuk pelatihan di BLK yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	112	112	-

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi	%	-	-	-	-	-	77,23	77,23	-
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi	%	-	-	-	-	-	77,23	77,23	-
2.07.04.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Sosialisasi bursa tenaga kerja dan rekrutmen tenaga kerja	Orang	-	-	-	-	-	120	120	-
		Jumlah perpindahan masyarakat ke daerah transmigrasi (KK)	KK	-	-	-	-	-	5	5	-
2.07.04.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Sosialisasi bursa tenaga kerja	kegiatan	-	-	-	-	-	7	7	-
2.07.04.2.03	Pengelola Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yang difasilitasi	77,23	-	-	-	-	-	77,23	77,23	-
2.07.04.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair	Kegiatan	-	-	-	-	-	0	0	-
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang fasilitasi	%	-	-	-	-	-	77,23	77,23	-
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pendampingan PMI	Orang	-	-	-	-	-	3.000	3.000	-
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	%	-	-	-	-	-	2	2	-
2.07.05.2.01	Pengesahan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Angka sengketa pekerja pertahun	%	-	-	-	-	-	2	2	-

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
	untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
2.07.05.2.01.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang diberi sosialisasi peraturan pelaksanaan Penyusunan UMK	perusahaan	-	-	-	-	-	150	150	-
		Jumlah Kecamatan yang di data dan survey (KHL) dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten	kec.	-	-	-	-	-	14	14	-
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	%	-	-	-	-	-	2	2	-
2.07.05.2.02.04	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang BerakibatBerdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus hubungan indistrial yang diselesaikan	3 kasus	-	-	-	-	-	3	3	-
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang di fasilitasi	%	-	-	-	-	-	100	100	-
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	-	-	-	-	-	100	100	-
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra, Renja, Sop)	Dok	-	-	-	-	-	3	3	-
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA – SKPD	Dok	-	-	-	-	-	1	1	-
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA – SKPD	Dok	-	-	-	-	-	1	1	-
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA – SKPD	Dok	-	-	-	-	-	1	1	-
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA – SKPD	Dok	-	-	-	-	-	1	1	-
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (LPPD, LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)	Dok	-	-	-	-	-	5	5	-
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	-	-	-	-	-	100		-

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	orang	-	-	-	-	-	60	60	-
		Jumlah kontrak daerah yang dibayar gajinya	Ob	-	-	-	-	-	1	1	-
2.18.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor	Jenis	-	-	-	-	-	46	46	-
2.18.01.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dok	-	-	-	-	-	1	1	-
2.18.01.2.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan / triwulanan/ semesteran SKPD	Dok	-	-	-	-	-	3	3	-
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan barang milik daerah	%	-	-	-	-	-	100	100	-
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	Dok	-	-	-	-	-	1	1	-
		Jumlah dokumen RKPBMMD	Dok	-	-	-	-	-	1	1	-
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen semesteran barang milik daerah	Dok	-	-	-	-	-	4	4	-
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio Pegawai yang mengikuti bintek dan jumlah ASN	%	-	-	-	-	-	0	0	-
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan	Ok	-	-	-	-	-	0	0	-

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
	Tugas dan Fungsi	dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya									
2.18.01.2.05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi perundang - undangan	Ok	-	-	-	-	-	0	0	-
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	100	100	-
2.18.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Jenis	-	-	-	-	-	24	24	-
2.18.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor	Jenis	-	-	-	-	-	56	56	-
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	-	-	-	-	-	6	6	-
		Jumlah spanduk / umbul - umbul / bendera yang diadakan	Jenis	-	-	-	-	-	3	3	-
2.18.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	jenis	-	-	-	-	-	10	10	-
		Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	Jenis	-	-	-	-	-	1	1	-
2.18.01.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exp	-	-	-	-	-	48	48	-
2.18.01.2.06. 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan	Ob	-	-	-	-	-	380	380	-

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
		dan Minuman tamu									
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan makanan dan minuman rapat	Ob	-	-	-	-	-	50	50	-
		Jumlah kebutuhan BBM	Liter	-	-	-	-	-	600	600	-
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	kali	-	-	-	-	-	17	17	-
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kali	-	-	-	-	-	26	26	-
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah	%	-	-	-	-	-	100	100	-
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan lemari arsip	Unit	-	-	-	-	-	2	2	-
		Jumlah pengadaan filling cabinet	Unit	-	-	-	-	-	2	2	-
		Jumlah pengadaan running text	Unit	-	-	-	-	-	1	1	-
		Jumlah pengadaan kursi lipat	Unit	-	-	-	-	-	10	10	-
		Jumlah pengadaan kursi sofa	Set	-	-	-	-	-	2	2	-
		Jumlah pengadaan AC	Unit	-	-	-	-	-	2	2	-

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah pengadaan play ground anak	set	-	-	-	-	-	1	1	-
		Jumlah pengadaan tandon air atas	unit	-	-	-	-	-	1	1	-
		Jumlah pengadaan meja rapat	unit	-	-	-	-	-	15	15	-
		Jumlah pengadaan kursi rapat	unit	-	-	-	-	-	16	16	-
		Jumlah Pengadaan komputer / laptop	unit	-	-	-	-	-	4	4	-
		Jumlah pengadaan printer	unit	-	-	-	-	-	4	4	-
2.18.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun / di rehab	1unit	-	-	-	-	-	1	1	-
		Jumlah pagar kantor yang dibangun	1 unit	-	-	-	-	-	1	1	-
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	-	-	-	-	-	100	100	-
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat	-	-	-	-	-	2250	2250	-
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan	Bulan	-	-	-	-	-	12	12	-

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
02	Air dan Listrik	komunikasi									
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	26	-	-	-	-	-	26	26	-
2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	%	-	-	-	-	-	100	100	-
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	unit	-	-	-	-	-	6	6	-
		Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit	-	-	-	-	-	13	13	-
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	-	-	-	-	-	26	26	-
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	-	-	-	-	-	3	3	-

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	%	-	-	-	-	-	100	100	-
2.18.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dok	-	-	-	-	-	1	1	-
		Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	kali	-	-	-	-	-	1	1	-
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah potensi Investasi	peta	-	-	-	-	-	1	1	-
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peluang investasi	peluang investasi	-	-	-	-	-	1	1	-
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah propektus kabupaten	propektus	-	-	-	-	-	1	1	-
		Rapat -rapat perencanaan penanaman modal dan RKPPMD	Kali	-	-	-	-	-	0	0	-
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMDN / PMA)	investor	912	840	852	2523	296,13	2743	6106	6,70

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor	investor	912	840	852	2523	296,13	2743	6106	6,70
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat Investor / Matchmaking	matchmaking	-	-	-	-	-	1	1	-
		Jumlah Pameran Investasi yang di ikuti	kali	-	-	-	-	-	2	2	-
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	%	100	44	100	100	100	100-	244	2,44
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	100	50	100	80	80	100	250	2,5
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	%	100	44	100	100	100	-	144	1,44
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem	Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan di sektor I	izin	-	-	-	-	-	50	50	-

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan di sektor II	izin	-	-	-	-	-	1000	1000	-
		Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan di sektor III	izin	-	-	-	-	-	60	60	-
2.18.04.2.01.0 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan tindak lanjut yang ditangani	Laporan	-	-				10	10	-
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah LKPM Pertahun	LKPM	-	-	-	-	-	120	120	-
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM Pertahun	LKPM	-	-	-	-	-	120	120	-
2.18.05.2.01.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan	pelaku	-	-	-	-	-	70	70	-

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
	Pelaksanaan Penanaman Modal	Pemantauan	usaha								
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal	pelaku usaha	-	-	-	-	-	40	40	-
		Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	kali	-	-	-	-	-	2	2	-
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	pelaku usaha	-	-	-	-	-	70	70	-
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DARA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN	Juta Rp.	967.865,730	542.274,000	574.434,712	629.178.507,48	109,53	149.039.109.008	1.310.491.616.488	1,35
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Investasi PMDN	Juta Rp.	967.865,730	542.274,000	574.434,712	629.178.507,48	109,53	149.039.109.008	1.310.491.616.488	1,35
2.18.05.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah pengembangan sistem informasi	paket	-	-	-	-	-	1	1	-

Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & keluaran Keg. s/d 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Ta. 2020	Realisasi Renja PD Ta. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
	Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	penanaman modal	aplikasi								
		Jumlah pengolahan data penanaman modal	laporan	-	-	-	-	-	12	12	-

Sampang, 03 Agustus 2021

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG**

Drs. H. NURUL HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611207 199302 1 001

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Dpmpmsp Naker sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2019 dan 2020 nihil, dikarenakan Periode Resntra DPMPTSP adalah Tahun 2019-2024, sehingga yang ada nilai realisasinya hanya Tahun 2021 saja dikarenakan adanya perubahan ke PERMENDAGRI 50 tahun 2020
2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2020 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena adanya perubahan pada SOTK dari DPMPTSP menjadi DPMPTSP NAKER.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Rancangan Awal Renstra 2019 - 2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan DPMPTSP NAKER dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T – C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTSP NAKER Kabupaten Sampang

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(13)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			2,38 %	2,33 %	3,22%	3,08%	2,81 %	3,35 %	3,08%	2,78 %	
a.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan			94,83%	94,98%	75%	95,26 %	95,73%	56,91%	95,26%	95, 39%	
2.	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi			13,85%	9,96%	0,08%	0,16%	9,70%	-29,69%	0,16%	0,24%	
a.	Nilai Realisasi Investasi (Juta Rp.)			385.297.435	464.667.875	299.943.870	303.257.158	422.583.748,152	297.115.146,207	303.257,158	306.687,934	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat			81,05	81,55	81,95	82,47	81,30	81,43	82,47	82,99	
a.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			93,10	93,15	93,25	93,35	93,13	93,16	93,35	93,50	
1	Tenaga Kerja											
	Persentase pencari kerja yang dilatih di BLK			66,67 %	67 %	68,18 %	68,75 %	97,50 %	38,00 %	68,75 %	69,23 %	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			50,15 %	50,23 %	80%	82%	50%	50%	82 %	85 %	
	Jumlah tenaga kerja yang di tempatkan di dalam negeri			350	500	550	566	346	647	566	575	

	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya			n/a	n/a	15	20	n/a	n/a	20	25	
	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri			n/a	n/a	160	400	n/a	n/a	400	400	
2	Penanaman Modal											
	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi			13,85 %	9,96 %	0,08 %	0,16 %	9,70 %	(-26,69) %	0,16 %	0,24 %	
	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal			385.297.435	464.667.875	299.943.870	303.257.158	422.583.748,152	297.115.146,207	303.257,158	306.687,934	
IV	Fokus Sumber Daya Manusia											
	Kualitas Tenaga Kerja											
	Persentase PencariKerja yang ditempatkan			94,83%	94,98%	75%	95,26 %	95,73%	56,91%	95,26%	95, 39%	
			Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja						0%			
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi						17,26%			
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja						0%			
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak						7,31%			

			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota						7,19%			
			Persentase peningkatan investasi dikabupaten / kota						13,80%			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

No	Bidang	Isu-isu Strategi	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi
1	Bidang Penanaman Modal	Iklm investasi daerah yang masih belum stabil	Belum terinventarisasinya potensi dan peluang potensi penanaman modal yang bernilai ekonomi (investasi)	<p>a. Data potensi masih kurang akurat dan tidak lengkap, hanya sebatas ikon</p> <p>b. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang metode penentuan potensi peluang penanaman modal</p> <p>c. Internas orgnisasi SDM dan Anggaran belum memadahi</p>
2	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan SOP dan SPM masih belum optimal	<p>a. Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk memiliki izin</p> <p>b. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang masih banyak menemui kendala dalam penyelesaiannya</p> <p>c. Belum optimalnya tugas teknis dan mekanisme proses pertimbangan/rekomendasi teknis</p>	<p>a. Pelaku usaha beranggapan bahwa biaya pengurusan izin mahal</p> <p>b. Lambatnya pertimbangan teknis dari dinas ternis terkait</p> <p>c. Kurangnya pegawai</p>
3	Bidang Tenaga Kerja (Penempatan, perluasan, Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja)	<p>a. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja</p> <p>b. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan angka pengangguran bertambah.</p> <p>c. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja dan kompetensi kerja serta tingginya tingkat pengangguran perlu adanya pelatihan kerja dalam jumlah yang sangat besar serta</p>	<p>Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah dan masih mengandalkan sektor formal.</p> <p>1. Kualitas pelatihan umumnya masih rendah</p> <p>2. Kurangnya tenaga instruktur</p>	<p>Rendahnya kesadaran calon tenaga kerja dalam meningkatkan kemampuan, kompetensi dan ketrampilan diri dalam persaingan dunia kerja</p> <p>1. Program pelatihan pada umumnya tidak menjamin penempatan.</p> <p>2. Kurangnya sarana dan prasarana pelatihan. 3. Peserta pendaftar pelatihan semakin banyak.</p>

		disesuaikan kebutuhan pasar.		
4	Bidang Tenaga Kerja (Hubungan Industrial Jamsostek)	a. Perusahaan yang menerapkan UMK jumlahnya masih sedikit.	Banyak perusahaan yang menyatakan kurang mampu menerapkan UMK	a. Tidak ada sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK b. Jumlah perusahaan kecil dan sedang lebih banyak dibanding perusahaan besar
		b. Penerapan syarat-syarat kerja, fasilitas kesejahteraan pekerja dan Jamsostek di perusahaan kurang maksimal (terutama perusahaan kecil dan sedang).	Kesadaran pengusaha untuk patuh terhadap aturan ketenagakerjaan masih rendah.	Dinas Tenaga Kerja tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi, peran Dinas Tenaga Kerja hanya melakukan fungsi pembinaan.
		c. Masih terdapat kasus perselisihan hubungan industrial tiap tahunnya.	a. Penerapan aturan ketenagakerjaan di perusahaan masih kurang. b. Pemahaman paturan ketenagakerjaan oleh pekerja masih kurang	Kurangnya monitoring dan evaluasi pasca permbinaan dan kunjungan tim deteksi dini oleh Dinas Tenaga Kerja.

2.3.1 Tingkat Pelayanan DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang

Dalam menyelenggarakan tugas pokok yaitu membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi.

- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang

Permasalahan dan hambatan DPMPTSP Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas dan Kualitas
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk menunjang pelayanan Perizinan.
- c. Kurangnya konsistensi UMKM di dalam menjalankan usahanya.

Hambatan DPMPTSP Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Belum optimalnya penggunaan system teknologi informasi
- b. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan system teknologi informasi
- c. Peningkatan Kerjasama dan koordinasi antara PTSP dengan Dinas teknis terkait sectoral dalam nota kesepahaman.
- d. Meningkatnya kebutuhan warga untuk memperoleh kejelasan dan kepastianwaktu untuk mengurus perizinan dan non perizinan.
- e. Partisipasi langsung dari warga dalam menyampaikan keluhan dan pengaduan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan
- f. Adanya perizinan dan non perizinan yang membutuhkan peninjauan atau pemeriksaan lapangan sementara petugas atau SDM yang dimiliki terbata.

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan terhadap capaian Program Nasional.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2019-2024, ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Sampang yaitu “**Sampang Hebat Bermartabat**” Dalam rangka pencapaian Visi secara efektif dan efisien disusunlah Misi Kepala Daerah Kabupaten Sampang yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Memperkuat tata Kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan Bersatu.

Keterkaitan urusan Penanaman Modal dengan Misi Kepala daerah adalah pada Misi Kedua yaitu ***“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”*** sedangkan keterkaitan urusan perizinan dengan misi Kepala daerah adalah pada misi keempat yaitu ***“Memperkuat tata Kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”***.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sampang mempunyai **tantangan** sebagai berikut :

- a. Akses Infrastruktur pendukung kegiatan logistic
- b. Adanya Pengaduan Masalah Perizinan
- c. Kemampuan msyarakat dalam memanfaatkan perijinan online ketidak sesuaiin kepemilikan perizinan

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Penerapan SPIPISE dan OSS
- b. Pengembangan Industri kreatif berbasis produk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi lokal

2.3.5 Rekomendasi Strategis untuk di tindak lanjuti dalam perumusan Program dan kegiatan prioritas tahun 2022

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP NAKER Kabupaten sampang terdapat Rekomendasi Strategis guna meningkatkan Kinerja DPMPTSP NAKER di Kabupaten Sampang yaitu :

- a. Dalam Pengukuran Kinerja IKU sudah disusun dan ditetapkan secara formal dan sudah dipublikasikan di website DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang.
- b. Hasil Pengukuran Kinerja mulai dari semua tingkat Eselon akan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment bagi pegawai di lingkungan DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang.
- c. Mengefesiensikan penggunaan sumber daya dalam laporan kinerja di DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang.
- d. Data untuk Laporan Kinerja sudah Valid
- e. Informasi kinerja sudah digunakan pada perbaikan perencanaan jangka menengah tahunan maupun dalam penetapan perjanjian kinerja yang disusun
- f. Sudah Menyusun Dokumen Rencana Aksi dengan mengadministrasikan kemajuan / progress kinerja.
- g. Meningkatkan Capaian sumber – sumber data yang kompeten, dapat ditelusuri sumber datanya

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan RPJMD tahun 2019 – 2024, Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang untuk Penanaman Modal dan Tenaga Kerja mengemban misi yang ke 2 yaitu **Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif** dengan Indikator Sasarannya Nilai Realisasi Investasi dan Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan sedangkan untuk Pelayanan Publik mengemban misi ke 4 yaitu : **Memperkuat tata Kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik** dengan Indikator Sasarannya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Tema Pembangunan kabupaten Sampang tahun 2021 adalah Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, Kesehatan, dan Infrastruktur Sampang Hebat Bermartabat dan untuk rencana Pembangunan tahun 2022 yaitu : Peningkatan dan pemerataan pembangunan dalam infrastruktur dalam mendukung pemantapan ekonomi menuju Sampang Hebat bermartabat.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan

kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi DPMPTSP dan NAKER Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel T – C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Sampang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			1.491.800.252	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			524.869.591	
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			1.004.394.661	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			37.464.000	Dana DID yang masih menunggu Surat Keputusan Menpan
4	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			1.004.394.661	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			37.464.000	Dana DID yang masih menunggu Surat Keputusan Menpan
5	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Pengangguran dan Pencari Kerja yang dilatih	114 Orang	642.651.887	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Pengangguran dan Pencari Kerja yang dilatih	114 Orang	10.206.000	Dana DID yang masih menunggu Surat Keputusan Menpan

6	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Peralatan dan Sarana Untuk Pelatihan di BLK yang dipelihara	112 Unit	361.742.774	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Peralatan dan Sarana Untuk Pelatihan di BLK yang dipelihara	112 Unit	27.258.000	Dana DID yang masih menunggu Surat Keputusan Menpan
7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			437.022.724	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			437.022.724	
8	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			183.751.397	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			183.751.397	
9	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Perpindahan Masyarakat ke Daerah Transmigrasi (KK) Sosialisasi Bursa tenaga kerja dan Rekrutmen Tenaga Kerja	5 KK 120 Orang	49.364.125	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Perpindahan Masyarakat ke Daerah Transmigrasi (KK) Sosialisasi Bursa tenaga kerja dan Rekrutmen Tenaga Kerja	5 KK 120 Orang	49.364.125	
10	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Sosialisasi Bursa tenaga kerja	7 kegiatan	134.387.272	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Sosialisasi Bursa tenaga kerja	7 kegiatan	134.387.272	
11	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			56.442.239	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			56.442.239	
12	Job Fair/Bursa Kerja	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Job Fair	1 keg	56.442.239	Job Fair/Bursa Kerja	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Job Fair	1 keg	56.442.239	

13	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			196.829.088	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			196.829.088	
14	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Pendampingan PMI bermasalah	40 Orang	196.829.088	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Pendampingan PMI bermasalah	40 Orang	196.829.088	
15	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			50.382.867	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			50.382.867	
16	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			34.480.825	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			34.480.825	
17	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Kecamatan yang di data dan di survey (KHL dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten) Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan Penyusunan UMK	14 Kecamatan 150 perusahaan 1 Dokumen	34.480.825	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Kecamatan yang di data dan di survey (KHL dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten) Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan Penyusunan UMK	14 Kecamatan 150 perusahaan 1 Dokumen	34.480.825	
18	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			15.902.042	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			15.902.042	

19	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	3 kasus	15.902.042	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	3 kasus	15.902.042		
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			6.792.439.298	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			6.696.369.959		
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			5.829.996.002	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			5.829.996.002		
22	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			25.412.223	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			25.412.223		
23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, SOP)	3 Dok	3.057.458	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, SOP)	3 Dok	3.057.458		
24	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	3.093.085	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	3.093.085		
25	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dok	3.037.964	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dok	3.037.964		
26	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1 Dok	3.100.732	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1 Dok	3.100.732		

27	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dok	3.104.982	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dok	3.104.982	
28	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LPPD,LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)	5 Dok	10.018.002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LPPD,LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)	5 Dok	10.018.002	
29	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			4.420.703.314	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			4.420.703.314	
30	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Kontrak Daerah yang dibayarkan Gajinya Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Pembayaran Honor PA/KPA/Bendahara/PPK SKPD/Pengurus Barang/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/ PPHP, Honor PPTK dan Staf PPTK)	1 Ob 50 Orang	4.412.651.172	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Kontrak Daerah yang dibayarkan Gajinya Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Pembayaran Honor PA/KPA/Bendahara/PPK SKPD/Pengurus Barang/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/ PPHP, Honor PPTK dan Staf PPTK)	1 Ob 50 Orang	4.412.651.172	
31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.043.549	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.043.549	
32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	5.008.593	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	5.008.593	

33	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			3.360.854	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			3.360.854	
34	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen	2.126.561	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen	2.126.561	
35	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen Semesteran Barang Milik Daerah	4 Dokumen	1.234.293	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen Semesteran Barang Milik Daerah	4 Dokumen	1.234.293	
36	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			60.322.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			60.322.000	
37	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Ok	34.470.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Ok	34.470.000	
38	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	7 Ok	25.852.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	7 Ok	25.852.000	
39	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			331.851.820	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			331.851.820	
40	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	15 Jenis	72.742.159	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	15 Jenis	72.742.159	

41	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Alat Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Flasdisk, hardisk, dll) Jumlah Spanduk / Umbul-Umbul / Bendera yang Diadakan	56 Jenis 6 Unit 3 Jenis	14.854.461	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Alat Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Flasdisk, hardisk, dll) Jumlah Spanduk / Umbul-Umbul / Bendera yang Diadakan	56 Jenis 6 Unit 3 Jenis	14.854.461	
42	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	50 jenis	19.865.050	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	50 jenis	19.865.050	
43	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Barang Cetak yang disediakan Jumlah Belanja Penggandaan yang disediakan	10 Jenis 1 Jenis	15.165.150	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Barang Cetak yang disediakan Jumlah Belanja Penggandaan yang disediakan	10 Jenis 1 Jenis	15.165.150	
44	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	4 Exp	4.560.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	4 Exp	4.560.000	
45	Fasilitas Kunjungan Tamu	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan dan Minuman Kunjungan Tamu	198 Orang x Bulan	7.920.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan dan Minuman Kunjungan Tamu	198 Orang x Bulan	7.920.000	
46	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah kebutuhan BBM Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1000 Liter 50 Orang 300 kali 450 kali	196.745.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah kebutuhan BBM Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1000 Liter 50 Orang 300 kali 450 kali	196.745.000	
47	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			149.113.177	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			149.113.177	

48	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 Unit	149.113.177	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 Unit	149.113.177	
49	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun	0 Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun	0 Unit	0	
50	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			622.445.354	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			622.445.354	
51	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Surat yang Terkirim	2250 Surat	2.505.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Surat yang Terkirim	2250 Surat	2.505.000	
52	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air, dan Komunikasi	12 Bulan	229.940.354	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air, dan Komunikasi	12 Bulan	229.940.354	
53	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah Jasa Tenaga Supir Jumlah Pendamping DAK Jumlah Petugas satpam Jumlah Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	11 Ob 1 Ob 2 Ob 10 Ob 2 Ob	390.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah Jasa Tenaga Supir Jumlah Pendamping DAK Jumlah Petugas satpam Jumlah Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	11 Ob 1 Ob 2 Ob 10 Ob 2 Ob	390.000.000	
54	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			193.787.538	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			193.787.538	

55	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang memperoleh Jasa Perizinan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas R4 / Operasional yang dipelihara	13 Unit 6 Unit	76.948.280	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang memperoleh Jasa Perizinan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas R4 / Operasional yang dipelihara	13 Unit 6 Unit	76.948.280	
56	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	54 Unit	19.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	54 Unit	19.400.000	
57	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Jumlah Rehabilitasi Kantor	1 Unit 1 Unit	97.439.258	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Jumlah Rehabilitasi Kantor	1 Unit 1 Unit	97.439.258	
58	Penataan Organisasi	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			22.999.722	Penataan Organisasi	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			22.999.722	
59	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen SKM Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1 Dok 1 Kali	22.999.722	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Dokumen SKM Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1 Dok 1 Kali	22.999.722	
60	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			150.000.045	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			116.930.706	
61	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			150.000.045	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			116.930.706	
62	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Prospektus Kabupaten/ Kota Rapat - Rapat Perencanaan Penanaman Modal dan RKPPMD	2 prospektus 3 Kali	150.000.045	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Prospektus Kabupaten/ Kota Rapat - Rapat Perencanaan Penanaman Modal dan RKPPMD	2 prospektus 3 Kali	116.930.706	

63	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			162.310.211	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			162.310.211	
64	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			162.310.211	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			162.310.211	
65	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Minat Investor /matchmaking Jumlah Pameran Investasi yang diikuti	1 matchmaking 2 kali Pameran	162.310.211	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Minat Investor /matchmaking Jumlah Pameran Investasi yang diikuti	1 matchmaking 2 kali Pameran	162.310.211	
66	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			218.473.142	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			218.473.142	
67	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			218.473.142	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			218.473.142	
68	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Izin Non OSS Jumlah Izin OSS	2300 Izin 4200 Izin	176.608.529	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Izin Non OSS Jumlah Izin OSS	2300 Izin 4200 Izin	176.608.529	

69	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Laporan SP, Maklumat Pelayanan, Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Laporan Tindak Lanjut yang ditangani Sosialisasi Peraturan Perundang - Undagan Perizinan dan Non Perizinan	3 Dokumen 10 laporan 5 Kali	41.864.613	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Laporan SP, Maklumat Pelayanan, Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Laporan Tindak Lanjut yang ditangani Sosialisasi Peraturan Perundang - Undagan Perizinan dan Non Perizinan	3 Dokumen 10 laporan 5 Kali	41.864.613		
70	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			174.084.978	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			174.084.978		
71	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			174.084.978	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			174.084.978		
72	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan	70 pelaku usaha	35.792.451	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan	70 pelaku usaha	35.792.451		
73	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Fasilitasi permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	40 pelaku usaha 2 pelaku usaha	102.489.331	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Fasilitasi permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	40 pelaku usaha 2 pelaku usaha	102.489.331		
74	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	70 pelaku usaha	35.803.196	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	70 pelaku usaha	35.803.196		
75	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			194.574.920	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			194.574.920		

76	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			194.574.920	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang			194.574.920	
77	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal (SIPP) Jumlah Pengolahan Data Penanaman Modal (Promosi Penanaman Modal Melalui Android)	1 paket Aplikasi 12 laporan	194.574.920	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP NAKER Kab. Sampang	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal (SIPP) Jumlah Pengolahan Data Penanaman Modal (Promosi Penanaman Modal Melalui Android)	1 paket Aplikasi 12 laporan	194.574.920	
TOTAL					8.221.239.550	TOTAL					7.221.239.550

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2022 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Dpmpptsp NakerTahun 2022

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Sampang Tahun 2022

Perangkat Daerah : Dpmpptsp Naker Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Dpmpptsp Naker pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMPSTP NAKER KABUPATEN SAMPANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

- a. Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2021 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan Tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Dpmpstp Naker sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sampang Tahun 2022

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sampang
Prioritas Pembangunan 1: Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	Prioritas Pembangunan 2: Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah
Prioritas Pembangunan 2: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Prioritas Pembangunan 1: Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 3: SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Penguatan Kemiskinan	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan ketahanan sosial masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat
Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Prioritas Pembangunan 2: Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah

Prioritas Pembangunan 6: Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup	Prioritas Pembangunan 1: Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 7: Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Prioritas Pembangunan 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan inovasi daerah. dan Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat

Sumber: Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2021

- b. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam PMDN 17 sesuai dengan urusan Dpmpptsp Naker Kabupaten Sampang sebagai berikut :

**Tabel Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Perangkat Daerah
Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Berdasarkan PMDN 17 Tahun 2021	Satuan	Target RKPD Tahun 2022	Target Nasional Tahun 2022
II.	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1	Tenaga Kerja			
	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih di BLK	%	68.75	-
a.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	82,00	19-20%
b.	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	566	17.800
c.	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	Orang	20	1.189.550
d.	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	Orang	400	12.000
2.	Penanaman Modal			
	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	%	0,16	-
	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Juta Rp.	303.257.158	968.400.000.000.000

3.2 Tujuan dan sasaran DPMPPTSP NAKER Kabupaten Sampang

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Sampang. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan

proses pencapaian tujuan. Misi pembangunan Kabupaten Sampang yang terkait dengan urusan penanaman modal dan Tenaga Kerja yaitu **Misi Ke-2 : Mewujudkan kemandiraan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif**. Dan yang terkait dengan urusan Perizinan ada pada **misi ke – 4 : Memperkuat tata Kelola pemerintahan dan desa yang tran splan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik**.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sampang tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja seperti diuraikan pada Tabel 3.2. berikut ini.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dpmpstsp Naker Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4
1.	Tujuan:		
	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,08%
	Sasaran:		
	Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	95,26%
2.	Tujuan:		
	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	0,16%
	Sasaran:		
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi (Juta Rp.)	303.257,157
3.	Tujuan:		
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,47
	Sasaran :		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,35

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dpmpstsp Naker Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan Dpmpstsp Naker mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Dpmpstsp Naker mendukung pada pencapaian **misi 2 yaitu : “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah**

dan Perdesaan melalui Pengembangan Agrobisnis , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ” misi 4 yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dpmpstsp yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Rancangan awal Renstra Dpmpstsp Naker Tahun 2019-2024, Dpmpstsp Naker Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian Misi 2 dan misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya Pengelolaan Sektor Unggulan dan ekonomi Kreatif” dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.**

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6. Program Promosi Penanaman Modal
7. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
8. Program Pengolahan Data dan system Informasi Penanaman Modal

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Dpmpstsp Naker Tahun 2022 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entri rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dpmpstsp Naker Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 .

- c.** Program dan Kegiatan Dpmpstsp Naker sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

- d.** Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 , yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C. 33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dpmpptsp Naker Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten Sampang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.221.239.550				8.347.403.797
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				524.869.591				1.529.652.949
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG DILATIH DI BLK	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	68,75%	37.464.000	DAU		68,75%	1.020.000.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	95,26 %	37.464.000	DAU		95,26 %	1.020.000.000
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pengangguran dan Pencari Kerja yang dilatih	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	114 Orang	10.206.000	DAU		200 Orang	650.000.000
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/ Kota	Jumlah Peralatan dan sarana untuk pelatihan di BLK yang di pelihara	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	112 unit	27.258.000	DAU		150 unit	370.000.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG DIFASILITASI	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	77,23 %	437.022.724	DAU		77,23 %	450.000.000
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	95,26 %	183.751.397	DAU		95,26 %	190.000.000
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Perpindahan Masyarakat ke Daerah Transmigrasi (KK)	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	5 KK	49.364.125	DAU		5 KK	50.000.000
		Sosialisasi Bursa tenaga kerja dan Rekrutmen Tenaga Kerja	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	120 orang		DAU		120 orang	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Sosialisasi Bursa Tenaga kerja	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	7 kegiatan	134.387.272	DAU		7 kegiatan	140.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	95,26 %	56.442.239	DAU		95,26 %	60.000.000
2.07.04.2.03.03	Job Fair/ Bursa Kerja	Job Air	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	1 kegiatan	56.442.239	DAU		1 kegiatan	60.000.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	95,26 %	196.829.088	DAU		95,26 %	200.000.000
5.01.2.07.04.2.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pendampingan PMI bermasalah	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	40 orang	196.829.088	DAU		40 orang	200.000.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	ANGKA SENGKRTA PENGUSAHA PEKERJA PERTAHUN	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	2 %	50.382.867	DAU		2 %	59.652.949
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	95,26 %	34.480.825	DAU		95,26 %	39.652.949
5.01.2.07.05.2.01.01	Penyelenggaraan pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Kecamatan yang di data dan di survey (KHL dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten)	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	14 Kecamatan	34.480.825	DAU		14 Kecamatan	39.652.949
		Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	150 Perusahaan		DAU		150 Perusahaan	
		Penyusunan UMK	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	1 dokumen		DAU		1 dokumen	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Peyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	95,26 %	15.902.042	DAU		95,26 %	20.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.07.05.2.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	3 kasus	15.902.042	DAU		3 kasus	20.000.000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6.696.369.959	DAU			6.817.750.848
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIFASILITASI	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	100 %	5.829.996.002	DAU		100 %	5.872.750.848
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	100 %	25.412.223	DAU		100 %	27.600.000
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, SOP)	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	3 dokumen	3.057.458	DAU		3 dokumen	3.500.000
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	1 dokumen	3.093.085	DAU		1 dokumen	3.500.000
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	1 dokumen	3.037.964	DAU		1 dokumen	3.500.000
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	1 dokumen	3.100.732	DAU		1 dokumen	3.500.000
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	1 dokumen	3.104.982	DAU		1 dokumen	3.500.000
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LPPD,LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	5 dokumen	10.018.002	DAU		5 dokumen	10.100.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	100 %	4.420.703.314	DAU		100 %	4.441.651.172
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kontrak Daerah yang dibayarkan Gajinya	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	1 Ob	4.412.651.172	DAU		1 Ob	4.433.651.172
		Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Pembayaran Honor PA/KPA/Bendahara/PPK		50 Orang		DAU		50 Orang	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		SKPD/Pengurus Barang/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/ PPHP, Honor PPTK dan Staf PPTK)							
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	1 dokumen	3.043.549	DAU		1 dokumen	3.000.000
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	3 dokumen	5.008.593	DAU		3 dokumen	5.000.000
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	100 %	3.360.854	DAU		100 %	3.500.000
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	1 dokumen	2.126.561	DAU		1 dokumen	2.000.000
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Semesteran Barang Milik Daerah	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	4 dokumen	1.234.293	DAU		4 dokumen	1.500.000
2.18.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	100 %	60.322.000	DAU		100 %	85.000.000
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	10 Ok	34.470.000	DAU		10 Ok	50.000.000
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	7 Ok	25.852.000	DAU		7 Ok	35.000.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	100 %	331.851.820	DAU		100 %	276.999.676
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	15 jenis	72.742.159	DAU		15 jenis	11.500.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	56 jenis	14.854.461	DAU		56 jenis	11.500.000
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Flasdisk, hardisk, dll)	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	6 unit		DAU		6 unit	
		Jumlah Spanduk / UmbulUmbul / Bendera yang Diadakan	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	3 jenis		DAU		3 jenis	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	50 jenis	19.865.050	DAU		50 jenis	23.524.676
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	10 jenis	15.165.150	DAU		10 jenis	15.525.000
		Jumlah Belanja Penggandaan yang disediakan	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	1 jenis		DAU		1 jenis	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	4 exp	4.560.000	DAU		4 exp	5.750.000
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan dan Minuman Kunjungan Tamu	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	198 Orang x Bulan	7.920.000	DAU		198 Orang x Bulan	9.200.000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan BBM	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	1000 Liter	196.745.000	DAU		1000 Liter	200.000.000
		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	50 Orang		DAU		50 Orang	
		Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	300 kali		DAU		300 kali	
		Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	450 kali		DAU		450 kali	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	100 %	149.113.177	DAU		100 %	200.000.000
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	33 unit	149.113.177	DAU		33 unit	200.000.000
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun	Dpmptsp Naker/ Kab. Sampang	0 unit	0	DAU		0 unit	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	100 %	622.445.354	DAU		100 %	653.000.000
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	2250 Surat	2.505.000	DAU		2250 Surat	3.000.000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air, dan Komunikas	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	12 Bulan	229.940.354	DAU		12 Bulan	250.000.000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	11 Ob	390.000.000	DAU		11 Ob	400.000.000
		Jumlah Jasa Tenaga Supir	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	1 Ob		DAU		1 Ob	
		Jumlah Pendamping DAK	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	2 Ob		DAU		2 Ob	
		Jumlah Petugas satpam	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	10 Ob		DAU		10 Ob	
		Jumlah Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	2 Ob		DAU		2 Ob	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	100 %	193.787.538	DAU		100 %	160.000.000
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang memperoleh Jasa Perizinan Kendaraan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	13 unit	76.948.280	DAU		13 unit	60.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas R4 / Operasional yang dipelihara	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	6 unit		DAU		6 unit	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	54 unit	19.400.000	DAU		54 unit	25.000.000
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	1 unit	97.439.258	DAU		1 unit	75.000.000
		Jumlah Rehabilitasi Kantor	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	1 unit		DAU		1 unit	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	100 %	22.999.722	DAU		100 %	25.000.000
2.18.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen SKM	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	1 dokumen	22.999.722	DAU		1 dokumen	25.000.000
		Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	1 kali		DAU		1 kali	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH POTENSI INVESTASI	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	2 Jenis	116.930.706	DAU		2 Jenis	155.000.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi Investasi	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	303.257,158 Juta Rupiah	116.930.706	DAU		303.257,158 Juta Rupiah	155.000.000
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Prospektus Kabupaten/ Kota	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	2 propektus	116.930.706	DAU		2 propektus	155.000.000
		Rapat - Rapat Perencanaan Penanaman Modal dan RKPPMD	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	3 kali		DAU		3 kali	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	JUMLAH INVESTOR (PMDN/PMA)	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	882 investor	162.310.211	DAU		882 investor	170.000.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi Investasi	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	303.257,158 Juta Rupiah	162.310.211	DAU		303.257,158 Juta Rupiah	170.000.000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Investor /matchmaking	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	1 Matchmaking	162.310.211	DAU		1 Matchmaking	170.000.000
		Jumlah Pameran Investasi yang diikuti	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	2 kali		DAU		2 kali	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE IZIN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	100 %	218.473.142	DAU		100 %	230.000.000
	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAK LANJUTI	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	100 %	100 %					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	93.35 nilai	218.473.142	DAU		93.35 nilai	230.000.000
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Non OSS	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	2300 Izin	176.608.529	DAU		2300 Izin	180.000.000
		Jumlah Izin OSS	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	4200 Izin		DAU		4200 Izin	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan SP, Maklumat Pelayanan, Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	3 Dokumen	41.864.613	DAU		3 Dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Tindak Lanjut yang ditangan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	10 laporan		DAU		10 laporan	
		Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Perizinan dan Non Perizinan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	5 Kali		DAU		5 Kali	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH LKPM PER-TAHUN	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	180 Pelaku Usaha	174.084.978	DAU		180 Pelaku Usaha	190.000.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi Investasi	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	303.257,158 Juta Rupiah	174.084.978	DAU		303.257,158 Juta Rupiah	190.000.000
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	70 pelaku usaha	35.792.451	DAU		70 pelaku usaha	40.000.000
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitasi permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	40 pelaku usaha	102.489.331	DAU		40 pelaku usaha	110.000.000
		Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan		2 pelaku usaha					2 pelaku usaha

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	70 pelaku usaha	35.803.196	DAU		70 pelaku usaha	40.000.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	NILAI INVESTASI PMDN	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	745.128 Juta Rp	194.574.920	DAU		745.128 Juta Rp	200.000.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi Investasi	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	303.257,158 Juta Rupiah	194.574.920	DAU		303.257,158 Juta Rupiah	200.000.000
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal (SIPP) Jumlah Pengolahan Data Penanaman Modal (Promosi Penanaman Modal Melalui Android)	Dpmpptsp Naker/ Kab. Sampang	1 paket Aplikasi	194.574.920	DAU		1 paket Aplikasi	200.000.000
TOTAL					Rp7.221.239.550.			TOTAL	Rp. 8.347.403.797

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP NAKER KABUPATEN SAMPANG

4.1 Rencana Kerja DPMPTSP NAKER Tahun 2022

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang yaitu Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sampang, meningkatnya investasi daerah dalam mewujudkan masyarakat Sampang Hebat Bermartabat dan meningkatnya kualitas pelayanan publik, telah ditetapkan sasaran untuk meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan yang mempunyai manfaat untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Sampang, meningkatnya realisasi investasi daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun 2022 dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Sampang dan dana DBHCHT / DID dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP NAKER Tahun 2022**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.221.239.550
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			524.869.591
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG DILATIH DI BLK	68,75%	37.464.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	95,26 %	37.464.000
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Pengangguran dan Pencari Kerja yang dilatih	114 Orang	10.206.000
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/ Kota	Jumlah Peralatan dan sarana untuk pelatihan di BLK yang di pelihara	112 unit	27.258.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG DIFASILITASI	77,23 %	437.022.724
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	95,26 %	183.751.397
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Perpindahan Masyarakat ke Daerah Transmigrasi (KK)	5 KK	49.364.125

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
		Sosialisasi Bursa tenaga kerja dan Rekrutmen Tenaga Kerja	120 orang	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Sosialisasi Bursa Tenaga kerja	7 kegiatan	134.387.272
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	95,26 %	56.442.239
2.07.04.2.03.03	Job Fair/ Bursa Kerja	Job Air	1 kegiatan	56.442.239
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	95,26 %	196.829.088
5.01.2.07.04.2.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pendampingan PMI bermasalah	40 orang	196.829.088
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	ANGKA SENGKERTA PENGUSAHA PEKERJA PERTAHUN	2 %	50.382.867
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	95,26 %	34.480.825
5.01.2.07.05.2.01.01	Penyelenggaraan pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Kecamatan yang di data dan di survey (KHL dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten)	14 Kecamatan	34.480.825
		Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	150 Perusahaan	
		Penyusunan UMK	1 dokumen	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Peyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	95,26 %	19.828.042
2.07.05.2.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	3 kasus	15.902.042
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			6.696.369.959
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100 %	5.829.996.002
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	100 %	25.412.223
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, SOP)	3 dokumen	3.057.458
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.093.085

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA – SKPD	1 dokumen	3.037.964
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	3.100.732
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD	1 dokumen	3.104.982
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LPPD, LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)	5 dokumen	10.018.002
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	4.420.703.314
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kontrak Daerah yang dibayarkan Gajinya Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (Pembayaran Honor PA/KPA/Bendahara/PPK SKPD/Pengurus Barang/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/ PPHP, Honor PPTK dan Staf PPTK)	1 Ob 50 Orang	4.412.651.172
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	3.043.549
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 dokumen	5.008.593
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	3.360.854
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	1 dokumen	2.126.561
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Semesteran Barang Milik Daerah	4 dokumen	1.234.293
2.18.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	60.322.000
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Ok	34.470.000
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	7 Ok	25.852.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	331.851.820
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	15 jenis	72.742.159
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Alat Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Flasdisk, hardisk, dll) Jumlah Spanduk / UmbulUmbul / Bendera yang	56 jenis 6 unit 3 jenis	14.854.461

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
		Diadakan		
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	50 jenis	19.865.050
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	10 jenis	15.165.150
		Jumlah Belanja Penggandaan yang disediakan	1 jenis	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	4 exp	4.560.000
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan dan Minuman Kunjungan Tamu	198 Orang x Bulan	7.920.000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan BBM	1000 Liter	196.745.000
		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	50 Orang	
		Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	300 kali	
		Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	450 kali	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	149.113.177
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 unit	149.113.177
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun	0 unit	0
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	622.445.354
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	2250 Surat	2.505.000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air, dan Komunikas	12 Bulan	229.940.354
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan	11 Ob	390.000.000
		Jumlah Jasa Tenaga Supir	1 Ob	
		Jumlah Pendamping DAK	2 Ob	
		Jumlah Petugas satpam	10 Ob	
		Jumlah Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2 Ob	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	193.787.538
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang memperoleh Jasa Perizinan Kendaraan	13 unit	76.948.280
		Jumlah Kendaraan Dinas R4 / Operasional yang dipelihara	6 unit	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	54 unit	19.400.000
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 unit	97.439.258
		Jumlah Rehabilitasi Kantor	1 unit	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	22.999.722
2.18.01.2.13.0 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen SKM	1 dokumen	22.999.722
		Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1 kali	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH POTENSI INVESTASI	2 Jenis	116.930.706
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Investasi	2 Jenis	116.930.706
2.18.02.2.02.0 2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Prospektus Kabupaten/ Kota	2 propektus	116.930.706
		Rapat - Rapat Perencanaan Penanaman Modal dan RKPPMD	3 kali	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	JUMLAH INVESTOR (PMDN/PMA)	882 investor	162.310.211
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi Investasi	303.257,158 Juta Rupiah	162.310.211
2.18.03.2.01.0 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Investor /matchmaking	1 Matchmaking	162.310.211
		Jumlah Pameran Investasi yang diikuti	2 kali	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE IZIN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU	100 %	218.473.142
		PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI	100 %	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.35 nilai	218.473.142
2.18.04.2.01.0 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Non OSS	2300 Izin	176.608.529
		Jumlah Izin OSS	4200 Izin	
2.18.04.2.01.0 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan SP, Maklumat Pelayanan, Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3 Dokumen	41.864.613
		Jumlah Laporan Tindak Lanjut yang ditangan	10 laporan	
		Sosialisasi Peraturan Perundang - Undagan Perizinan dan Non Perizinan	5 Kali	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	180 Pelaku Usaha	174.084.978
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	180 Pelaku Usaha	174.084.978
2.18.05.2.01.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan	70 pelaku usaha	35.792.451

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
2.18.05.2.01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitasi permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal	40 pelaku usaha	102.489.331
		Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	2 pelaku usaha	
2.18.05.2.01.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	70 pelaku usaha	35.803.196
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	NILAI INVESTASI PMDN	745.128 Juta Rp	194.574.920
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NILAI INVESTASI PMDN	745.128 Juta Rp	194.574.920
2.18.06.2.01.0 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal (SIPP)	1 paket Aplikasi	194.574.920
		Jumlah Pengolahan Data Penanaman Modal (Promosi Penanaman Modal Melalui Android)	12 laporan	
TOTAL				Rp7.221.239.550.

Rencananya Pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja akan melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dengan total anggaran **Rp. 7.221.239.550** yang terdiri dari **9 program, 20 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan Sub kegiatannya yaitu di Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan lingkup Kabupaten Sampang.

4.2 INOVASI DPMPTSP NAKER

Inovasi DPMPTSP NAKER adalah suatu bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan di DPMPTSP NAKER itu sendiri dan merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan di lingkup DPMPTSP NAKER. Secara Teknis Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang ditempuh untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang ada di hadapi DPMPTSP NAKER serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Sampang dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang di mana DPMPTSP NAKER itu sendiri

termasuk kedalam prioritas 2 yaitu **“Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan dan Peningkatan Nilai Tambah”**

Adapun Inovasi yang digagas oleh DPMPTSP NAKER yang akan dilaksanakan dan dikembangkan pada tahun 2022 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/ atau untuk mengatasi persoalan yang di hadapi dalam pelaksanaan urusan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja antara lain dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Inovasi DPMPTSP NAKER dalam Rangka Mempercepat Pencapaian Target Kinerja

NAMA INOVASI	DESKRIPSI	PENAGGUNG JAWAB
1	2	3
PRIORITAS 2 : PEMANTAPAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PENGUATAN SEKTOR UNGGULAN DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH		
FITAMIN BAROKAH (Fasilitas Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi pembangunan perekonomian daerah, walaupun Usaha Kecil dan Menengah masih memiliki persoalan-persoalan yang kompleks. Untuk memajukan ekonomi masyarakat yang bergerak di sektor UMKM perlu adanya dukungan dari semua pihak, Pemerintah dan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker membuka program fasilitasi kemitraan Usaha Besar dengan UMKM untuk memperoleh akses pasar yang lebih besar sehingga membuka peluang bagi tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil Menengah	DPMPTSP NAKER BIDANG PENANAMAN MODAL
LANJUT MAS BROOO...!! (Pelayanan Antar Jemput IUMK Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sampang)	Kehadiran layanan antar jemput pengurusan perizinan berusaha (IUMK) bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sampang dan fenomena munculnya berbagai Inovasi disektor publik memberi warna baru bagi dalam implementasi layanan publik. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk Penyandang Disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Peran dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sampang salah satunya tercermin dari pertemuan Bupati Sampang	DPMPTSP NAKER BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

	<p>dengan Penyandang Disabilitas pada tanggal 16 Juni 2020 di kantor Bupati Sampang pada pemberitaan website https://sampangkab.go.id, dimana pertemuan tersebut intinya penyandang Disabilitas memohon kepada Pemerintah Kabupaten Sampang dalam hal ini BupatiSampang untuk memprioritaskan yaitu : Bantuan Sosial, Perizinan dan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenaga Kerjaan. Kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sampang atas permintaan dimaksud diatas Bupati Sampang langsung memanggil 3 OPD terkait tersebut (Dinas Sosial, Diskopnaker, DPMPTSP dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan) untuk menyikapi pertemuan antara Bupati Sampang dengan Penyandang Disabilitas dimaksud diatas.</p>	
<p>FAIS LAGI ONLINE (Fasilitas Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Online)</p>	<p>Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu salah satu tugas pokok dan fungsinya melakukan pengendalian atas pelaku usaha di Kabupaten Sampang dalam bentuk pemeberian fasilitasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang setiap tahun dilaksanakan. Setelah melakukan kegiatan tersebut terdapat kendala atau permasalahan di lapangan yang salah satunya pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban melakukan pelaporan yang setiap tiga bulan sekali harus dilaporkan. Berawal dari permasalahan tersebut DPMPTSP melakukan perubahan system kinerja dengan pembedakan tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam pengisian laporan kegiatan penanaman modal dengan cara melakukan pendampingan pengisian LKPM Online.</p>	<p>DPMPTSP NAKER BIDANG PENANAMAN MODAL</p>
<p>YANPUTSAH (Pelayanan Fasilitasi Penjemputan Jenasah Bagi Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Sampang)</p>	<p>Kehadiran layanan fasilitasi penjemputan Jenasah Pekerja Migran Indonesia (PMI) bagi keluarga yang ditinggalkan sangat membantu sekali mengingat pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Kabupaten Sampang yang ada di Malaysia secara Non Prosdural jumlahnya ribuan sedang yang meninggal menurut data Tahun 2020 antara lain 92 jenasah yang difasilitasi oleh LP4 TKI Pamekasan 11 Orang difasilitasi Dinas Kopeasi usaha Mikro dan Tenaga Kerja 32 orang difasilitasi oleh BP2MI Serang 29 Orang dan yang mandiri 20 Orang, PMI deportasi 605 Orang dari Kabupaten Sampang</p>	<p>DPMPTSP NAKER BIDANG TENAGA KERJA</p>
<p>BKK (Pelayanan Bursa Kerja Khusus)</p>	<p>Kehadiran layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) merupakan mitra kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis di dalam melaksanakan kegiatan</p>	<p>DPMPTSP NAKER BIDANG TENAGA KERJA</p>

	<p>antar kerja sekaligus sebagai salah satu sarana utama dalam melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia. Agar pencari kerja lulusan (alumninya) dapat disalurkan dan ditempatkan suatu pekerjaan/jabatan yang sesuai dengan bakat, minat pendidikan, pengalaman dan ketrampilan. Dapat mengisi lowongan pekerjaan / jabatan yang tersedia sesuai yang diinginkan oleh pengguna tenaga kerja, serta dapat melayani secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan mekanisme sistim Antar Kerja. Diharapkan nantinya para lulusan/ alumni SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Sampang dapat di fasilitasi penempatan tenaga kerjanya melalui Bursa Kerja Khusus (BKK).</p>	
--	--	--

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2021 dan merupakan dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.

Pencapaian Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang tahun 2022 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) revisi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 dan RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024. Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Sampang dapat mencapai target kinerja yang diinginkan khususnya bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja umumnya bagi pihak – pihak yang terkait.

Komitmen dan dukungan dari seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan tersebut dan guna terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak. Harapan kami semoga Renja Tahun 2022 ini dapat dipedomani dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance, Peningkatan Penempatan Pencari Kerja, dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Sampang.

Sampang, Agustus 2021

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG**

**Drs. H. NURUL HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611207 199302 1 001**

